EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN PENDUDUK MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Arvin M.H. Sitanggang
NPP. 33.0066
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: arvinstg2003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Rully Sumual, S.Pd., M.AP.
Email: rullysumual@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: Despite various social assistance programs implemented in Asahan Regency, the poverty rate remains at 8.12%, exceeding the provincial average of 7.99%, indicating that existing programs may not have achieved optimal effectiveness in improving the quality of life of the poor. ***Purpose:*** This study aims to analyze the effectiveness of poverty alleviation programs implemented by the Social Affairs Office of Asahan Regency, North Sumatra Province. ***Method:*** This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection was conducted through observation, documentation, and in-depth interviews with relevant stakeholders. Data analysis was performed digitally using NVivo 15.2 software through coding processes and data visualization. ***Result:*** The Goal Attainment dimension shows success in distributing social assistance, contributing to the reduction of the poverty rate to 7.18%. The System Resource dimension reveals adequate human resources and budget support, though field personnel remain insufficient relative to the coverage area. The Internal Process dimension uncovered technical obstacles in the form of non-automated data system integration. In the Strategic Constituents dimension, the primary challenge is resistance from certain community members toward the data verification process. ***Conclusion:*** The poverty alleviation program by the Social Affairs Office of Asahan Regency has been implemented quite effectively, though improvements are needed in data system integration and economic empowerment programs to ensure sustainable community independence.

Keywords: *Effectiveness; Poverty Alleviation; Quality of Life.*

ABSTRAK

Permasalahan: Meskipun berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan di Kabupaten Asahan, angka kemiskinan masih berada di angka 8,12%, melampaui rata-rata provinsi sebesar 7,99%, yang mengindikasikan bahwa program yang ada belum mencapai efektivitas optimal dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program penanggulangan penduduk miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan secara digital menggunakan perangkat lunak NVivo 15.2 melalui proses coding dan visualisasi data. **Hasil/Temuan:** Dimensi Pencapaian Tujuan menunjukkan keberhasilan penyaluran bantuan yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan menjadi 7,18%. Dimensi Akuisisi Sumber Daya mengungkap ketercukupan SDM dan dukungan anggaran, namun personel lapangan masih kurang dibanding cakupan wilayah. Dimensi Proses Internal menemukan hambatan teknis berupa belum terintegrasinya sistem data secara otomatis. Pada Dimensi Konstituen Strategis, tantangan utama adalah resistensi sebagian masyarakat terhadap proses verifikasi data. **Kesimpulan:** Program penanggulangan penduduk miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan telah berjalan cukup efektif, namun perlu akselerasi integrasi data dan penguatan program pemberdayaan ekonomi agar peningkatan kualitas hidup masyarakat bertransformasi menjadi kemandirian yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas; Penanggulangan Kemiskinan; Kualitas Hidup.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kependudukan yang paling kompleks karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup manusia. Todaro dan Smith (2017) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi absolut maupun relatif di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, dan menegaskan bahwa kemiskinan di negara berkembang selalu berkaitan erat dengan rendahnya akumulasi modal manusia, ketimpangan distribusi aset produktif, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan layanan publik. Pandangan ini diperkuat oleh Santos et al. (2015) yang mengembangkan kerangka pengukuran kemiskinan multidimensional melalui Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), dengan menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui satu indikator pendapatan, melainkan harus diukur melalui deprivasi simultan pada berbagai dimensi kehidupan manusia yang saling berkaitan. Suyanto (2018) menambahkan dimensi sosiologis dengan menyatakan bahwa kemiskinan bukan semata kondisi material, melainkan juga konstruksi

sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, stigma, dan eksklusi sosial yang dialami kelompok miskin dalam interaksinya dengan institusi pemerintah. Pemahaman sosiologis ini penting dalam menganalisis resistensi sebagian masyarakat terhadap proses klasifikasi desil DTSEN yang ditemukan dalam penelitian ini.

Pada tataran global, UNDP (2020) dalam Human Development Report 2020 menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia yang berkelanjutan. Laporan tersebut menekankan bahwa negara-negara yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan adalah mereka yang mampu mengintegrasikan program perlindungan sosial dengan investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis sebagai fondasi kesejahteraan generasi mendatang. World Bank (2019) melalui laporan Poverty and Shared Prosperity memperkuat pandangan tersebut dengan menemukan bahwa penurunan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran, responsif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan sosial ekonomi yang terjadi di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan data BPS per Maret 2025, sebanyak 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan yang mencakup kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per hari serta kebutuhan non-makanan (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pakaian). Hutasoit (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan pelayanan sosial akan menghasilkan tekanan demografis yang berdampak langsung pada meluasnya kantong-kantong kemiskinan, khususnya di daerah dengan laju migrasi masuk yang tinggi dan tingkat ketergantungan penduduk yang besar.

Di Provinsi Sumatera Utara, angka kemiskinan per Maret 2025 berada di angka 7,99% atau sekitar 1.140.000 jiwa. Namun secara spesifik, Kabupaten Asahan mencatat persentase kemiskinan sebesar 8,12%, melampaui rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Asahan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan penduduk miskin, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan program pemberdayaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program-program ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar.

Hanna dan Olken (2018) melalui kajian komprehensif terhadap berbagai program anti-kemiskinan di negara berkembang menyimpulkan bahwa program transfer bertarget

seperti PKH dan BPNT pada umumnya lebih efisien secara fiskal dibandingkan program bantuan universal, karena memungkinkan konsentrasi sumber daya pada kelompok paling rentan. Namun demikian, Hanna dan Olken (2018) juga mengingatkan bahwa efektivitas program transfer bertarget sangat bergantung pada kualitas sistem penargetan yang digunakan semakin akurat basis data penerima manfaat, semakin besar dampak program terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam perspektif kebijakan sosial nasional, Suharto (2017) menegaskan bahwa kebijakan sosial yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan nyata masyarakat di lapangan dengan desain program yang dirumuskan di tingkat pusat.

Relevansi program penanggulangan kemiskinan terhadap kualitas hidup masyarakat telah dikaji secara ekstensif dalam berbagai penelitian. Cahyadi et al. (2020) membuktikan secara eksperimental bahwa program PKH selama enam tahun mampu meningkatkan penggunaan tenaga kesehatan terlatih saat persalinan secara dramatis, menurunkan angka anak tidak sekolah hingga 50%, dan mengurangi angka stunting sebesar 23%. Meski demikian, transfer tunai ini tidak menghasilkan perubahan ekonomi transformatif bagi rumah tangga penerima manfaat, sehingga penguatan program pemberdayaan jangka panjang tetap diperlukan. Temuan ini memperkuat urgensi penelitian yang tidak hanya mengukur capaian distribusi bantuan, tetapi juga mengevaluasi keberlanjutan dampak program terhadap kemandirian masyarakat miskin. Dalam konteks yang lebih luas, Suryahadi et al. (2021) menemukan bahwa ekspansi program perlindungan sosial Indonesia (PKH, BPNT, BLT) selama pandemi Covid-19 berhasil meredam kenaikan angka kemiskinan hingga empat poin persentase, atau sekitar tiga perempat dari dampak yang seharusnya terjadi tanpa intervensi bantuan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh kecepatan respons pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran yang tepat.

1.2. Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah mengkaji efektivitas program penanggulangan kemiskinan, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas menggunakan empat dimensi teori Richard L. Daft (2016) secara komprehensif pada konteks dinas sosial kabupaten yang memiliki karakteristik wilayah luas dengan 25 kecamatan serta mengalami tantangan integrasi sistem data kependudukan DTSEN. Penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara besarnya cakupan program bantuan sosial di Kabupaten Asahan dengan masih tingginya angka kemiskinan yang melebihi rata-rata provinsi, mengindikasikan adanya hambatan dalam efektivitas pelaksanaan program.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas program penanggulangan kemiskinan sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Apabila tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku

kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami hambatan teknis integrasi data, kecukupan SDM lapangan, dan tingkat kepuasan konstituen strategis, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan berisiko berjalan tidak optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Nurcahayani et al. (2024) mengkaji efektivitas penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Gorontalo dengan metode kualitatif dan menemukan program cukup efektif namun masih terdapat catatan dalam hal penerima ganda. Hastuti (2025) meneliti efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan menyimpulkan program tergolong sangat efektif dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Matondang et al. (2022) menganalisis efektivitas pengentasan kemiskinan melalui PKH di Kelurahan Padangmatinggi Lestari sebagai studi kasus mikro. Abustan (2020) dalam kajian manajemen pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial menekankan pentingnya kombinasi bantuan jangka pendek dan pemberdayaan jangka panjang. Madjid, Udaya dan Supriatna (2025) membahas pemerintahan daerah dan pelayanan publik sebagai kerangka penyelenggaraan program sosial yang efektif.

Penelitian ini memperkuat dan memperluas sejumlah kajian terdahulu yang relevan. Nugroho et al. (2021) mengkaji perkembangan dan tantangan program pengentasan kemiskinan Indonesia secara lintas program, mulai dari bantuan berbasis pangan, subsidi energi, hingga PKH dan PBI-JK, dan menemukan bahwa inakurasi data sasaran serta minimnya komplementaritas antar program masih menjadi tantangan struktural yang belum terselesaikan. Temuan ini langsung relevan dengan hambatan teknis integrasi data DTSEN yang ditemukan dalam penelitian Arvin di Kabupaten Asahan.

Zreik (2025) secara khusus mengkaji dampak hibah keuangan sosial terhadap pengentasan kemiskinan pedesaan di Indonesia melalui pendekatan demografi dan analisis ekonometrik, dengan menggunakan metode DiD dan propensity score matching. Penelitian tersebut menemukan bahwa bantuan sosial berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan penurunan angka kemiskinan, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor demografis penerima dan ketepatan mekanisme penargetan. Ruja et al. (2024) melalui tinjauan sistematis terhadap 22 artikel dari database Scopus dan Web of Science menyimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di kawasan perkotaan maupun pedesaan paling efektif ketika mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan memperhitungkan manfaat sosial, ekonomi, serta lingkungan secara bersamaan.

Di tingkat kelembagaan, Sutiyo et al. (2020) yang mengkaji partisipasi masyarakat miskin dalam desentralisasi desa di Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa mekanisme musyawarah desa yang ditetapkan oleh undang-undang belum berjalan optimal dalam mengakomodasi suara masyarakat miskin. Kepala desa dan aparat

kecamatan lebih berfokus pada laporan administratif daripada kualitas partisipasi, sehingga proyek yang dibiayai seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil warga miskin. Temuan ini sejalan dengan hambatan yang ditemukan dalam penelitian pada dimensi kepuasan konstituen strategis, di mana resistensi sebagian masyarakat terhadap klasifikasi desil DTSEN juga berakar dari minimnya keterlibatan mereka dalam proses verifikasi data.

Sementara itu, Sutiyo (2022) menegaskan bahwa distribusi program perlindungan sosial di Indonesia kerap tidak tepat sasaran akibat ketidaksesuaian antara kriteria nasional yang ditetapkan secara terpusat dengan realitas dan kondisi sosial-budaya di tingkat lokal, dan menyarankan pendekatan seleksi berbasis komunitas sebagai alternatif yang lebih akurat dan dapat diterima masyarakat. Ma'ruf (2022) mengkaji implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan wawancara mendalam terhadap 23 responden yang terdiri dari regulator, implementor, dan masyarakat penerima manfaat. Penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi kebijakan memberikan dampak positif terhadap perluasan akses pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan penurunan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, Ma'ruf (2022) juga mencatat masih terdapat aparat pelaksana yang kurang simpatik dalam menjalankan tugasnya, serta perlunya penguatan konfigurasi dan kolaborasi antara aktor regulator, implementor, dan masyarakat penerima manfaat untuk mencapai model implementasi yang optimal.

Dalam perspektif yang lebih makro, Yuda dan Kühner (2023) mengulas posisi Indonesia dalam debat global rezim kesejahteraan dan menyimpulkan bahwa sistem perlindungan sosial Indonesia belum dapat dikategorikan secara tunggal ke dalam satu rezim yang mapan, mengingat masih kuatnya campuran antara logika produktivis, familisme, dan klientelisme dalam desain kebijakan sosialnya. Kajian ini memberikan kerangka analitik yang berguna untuk memahami mengapa program-program seperti PKH dan BPNT menghadapi tantangan implementasi struktural yang berulang di berbagai daerah termasuk Kabupaten Asahan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena menggunakan empat dimensi efektivitas organisasi Richard L. Daft (2016) secara menyeluruh (Goal Attainment, System Resource, Internal Process, dan Strategic Constituents Satisfaction). Kebaruan juga tampak dari objek penelitian yakni dinas sosial tingkat kabupaten dengan cakupan 25 kecamatan yang mengelola transisi sistem data dari DTKS menuju DTSEN berbasis desil BPS, sebuah fenomena baru yang belum dikaji penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggabungan perspektif institusional (Sutiyo, 2022; Yuda & Kühner, 2023) dengan analisis efektivitas berbasis dimensi organisasi Daft (2016)

yang dikombinasikan dengan teknologi analisis digital NVivo 15.2, sebuah kombinasi metodologis yang belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya di konteks dinas sosial tingkat kabupaten di Indonesia.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program penanggulangan penduduk miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan teori efektivitas organisasi Richard L. Daft (2016).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dipilih karena kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mengukur capaian program secara angka, tetapi juga memahami secara mendalam proses, hambatan, dan dinamika pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Penilaian efektivitas organisasi publik dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori Daft (2016) yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka dengan empat dimensi efektivitas yang saling berkaitan. Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pendekatan ini relevan karena Mahmudi (2019) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada satu aspek, melainkan harus mencakup dimensi masukan, proses, keluaran, dan dampak secara terintegrasi. Mahmudi (2019) juga menekankan bahwa efektivitas organisasi publik pada akhirnya harus diukur dari sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dilayaninya, bukan sekadar memenuhi target administratif internal. Mardiasmo (2018) memperkuat perspektif ini dari sudut pandang otonomi daerah, dengan menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang diiringi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya program-program kesejahteraan sosial yang efektif dan tepat sasaran di tingkat kabupaten dan kota. Dalam konteks Kabupaten Asahan, kerangka ini mengisyaratkan bahwa efektivitas Dinas Sosial dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas proses internal, koordinasi antar lembaga, dan kapasitas pengelolaan data yang dimiliki.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposive. Informan terdiri dari Kepala Dinas Sosial (informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan tertinggi), Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Linjamsos, Petugas Verifikasi dan Validasi Data, Kepala Seksi Data dan Informasi, dua orang Staf Pelaksana Program/Pendamping PKH, dan tiga orang Masyarakat Penerima Bantuan Sosial. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran utuh dari sisi kebijakan, pelaksana teknis, dan penerima manfaat.

Analisis data dilakukan secara digital menggunakan perangkat lunak NVivo 15.2 melalui proses coding tematik dan visualisasi data berupa word cloud, hierarchy chart, dan diagram dimensi, guna memastikan objektivitas dan kedalaman temuan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi antar informan) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selama bulan Januari hingga April 2026. Kabupaten Asahan dipilih karena memiliki angka kemiskinan 8,12% yang melampaui rata-rata provinsi dan aktif melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, sehingga menjadi lokasi yang strategis untuk mengkaji efektivitas implementasi program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas program penanggulangan penduduk miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan menggunakan empat dimensi teori efektivitas organisasi Richard L. Daft (2016), yaitu: Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*), Akuisisi Sumber Daya (*System Resource*), Proses Internal (*Internal Process*), dan Kepuasan Konstituen Strategis (*Strategic Constituents Satisfaction*).

3.1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Dimensi pencapaian tujuan menilai keberhasilan Dinas Sosial dalam mencapai target yang telah dirumuskan, yakni penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan Kabupaten Asahan menjadi 7,18% pada tahun 2025. Sebanyak 22.877 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan sekitar 85.200 KPM BPNT/Sembako telah menerima bantuan secara reguler.

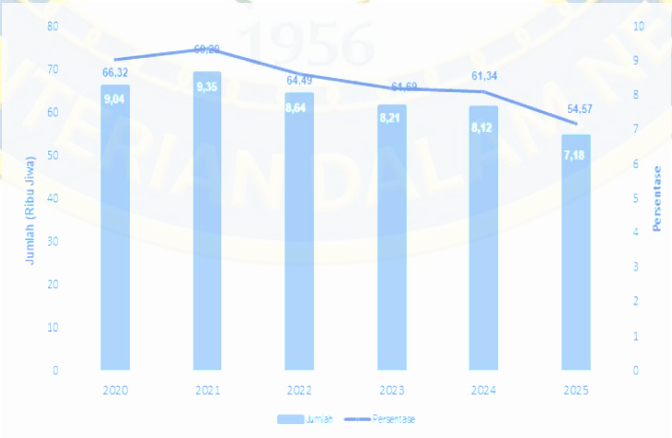

Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa tujuan utama program adalah peningkatan kualitas hidup agar penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada bantuan dan dapat keluar dari zona kemiskinan secara permanen. Indikator keberhasilan utama yang

digunakan adalah penurunan angka kemiskinan serta jumlah KPM yang berhasil *graduasi mandiri*. Secara signifikan, program ini telah meningkatkan akses penerima manfaat terhadap layanan kesehatan melalui PBI-JK, pemenuhan kebutuhan pangan pokok, serta pengurangan beban pengeluaran rumah tangga.

3.2. Akuisisi Sumber Daya (*System Resource*)

Dimensi ini menggambarkan sejauh mana Dinas Sosial memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sumber pendanaan program bersifat multi-sumber: bantuan langsung (PKH, PBI-JK, BPNT) bersumber dari APBN Kemensos, sementara program pemberdayaan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) didanai dari APBD. Pada tahun 2025, Dinas Sosial berhasil memberikan bantuan UEP kepada 79 penerima untuk mendukung usaha mandiri.

No.	Nama Program Bantuan	Jumlah Penerima (Estimasi Terbaru)	Bentuk Bantuan	Sumber Anggaran
1.	**Program Keluarga Harapan (PKH)**	~ 38.500 KPM[1]	Uang tunai (transfer bank per tahap)	APBN (Kemensos)
2.	**Program Sembako / BPNT[2]**	~ 85.200 KPM[1]	Uang tunai (Rp200.000/bulan)	APBN (Kemensos)
f3.	**Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)**	> 295.000 Jiwa	Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kelas 3	APBN & APBD
4.	**Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa**	Ditetapkan di tingkat desa (bervariasi)	Uang tunai (Rp300.000/bulan)	Dana Desa (APBN)

Secara kuantitas, terdapat 81 pendamping PKH yang tersebar di 25 kecamatan mendampingi sekitar 22.000 KPM. Rasio ini dinilai masih kurang ideal mengingat luasnya wilayah Kabupaten Asahan dengan 25 kecamatan. Strategi optimalisasi dilakukan melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan lembaga sosial lokal, serta pemanfaatan teknologi SIKS-NG. Tantangan stabilitas jaringan internet di beberapa kecamatan terpencil masih menjadi hambatan operasional.

3.3. Proses Internal (*Internal Process*)

Dimensi proses internal menilai kelancaran dan keteraturan proses kerja di internal Dinas Sosial. Koordinasi antar bidang dilakukan melalui rapat koordinasi bulanan yang membahas kendala teknis dan capaian kinerja. Sistem SIKS-NG digunakan sebagai platform utama pengelolaan data dan pemantauan status penyaluran bantuan secara digital.

Hambatan teknis signifikan ditemukan berupa belum terintegrasinya sistem data kependudukan (Disdukcapil) dengan sistem data sosial (DTSEN-BPS) secara otomatis.

Kondisi ini menyebabkan *double entry* dan ketidaksesuaian data ketika warga pindah domisili, karena pembaruan data kependudukan dan data DTSEN harus diurus secara terpisah. Transisi dari sistem DTKS menuju DTSEN berbasis desil BPS juga memerlukan adaptasi prosedural yang cukup intensif bagi seluruh jajaran pelaksana.

3.4. Kepuasan Konstituen Strategis (*Strategic Constituents Satisfaction*)

Dimensi ini mengukur sejauh mana Dinas Sosial mampu memenuhi kebutuhan dan memuaskan kelompok pemangku kepentingan utama. Secara umum, masyarakat penerima manfaat menyatakan kepuasan terhadap program, khususnya dalam hal kepastian waktu penyaluran bantuan dan akses layanan kesehatan melalui PBI-JK. Bantuan PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan memperbaiki kondisi rumah, sementara BPNT memastikan ketersediaan bahan pangan pokok yang bergizi.

Tantangan utama pada dimensi ini adalah resistensi sebagian masyarakat terhadap proses klasifikasi desil DTSEN. Banyak warga yang keberatan dengan penetapan desil yang mengkategorikan mereka sebagai mampu dan tidak berhak mendapat bantuan, serta ketidaktahuan tentang prosedur pembaruan data DTSEN setelah pindah domisili. Dinas Sosial merespons hal ini melalui layanan pengaduan yang dapat diakses langsung di kantor dinas maupun melalui pendamping lapangan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurcahayani et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial cukup efektif dalam hal ketepatan sasaran dan pemantauan program, namun masih ditemukan catatan terkait akurasi data penerima. Berbeda dengan temuan Hastuti (2025) yang menilai program PKH di Kecamatan Libureng tergolong sangat efektif, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas di Kabupaten Asahan lebih bervariasi antar dimensi; dimensi pencapaian tujuan dan kepuasan konstituen relatif baik, sementara dimensi proses internal masih menghadapi hambatan teknis yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Temuan ini memperkuat penelitian Matondang et al. (2022) bahwa program PKH memberikan dampak langsung yang nyata bagi penerima manfaat, khususnya dalam mengurangi beban pengeluaran pangan dan meningkatkan akses pendidikan anak. Kebaruan temuan dalam penelitian ini terletak pada identifikasi hambatan teknis integrasi sistem data DTSEN-SIKS-NG-Disdukcapil, serta penggunaan NVivo 15.2 yang meningkatkan objektivitas analisis temuan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nugroho et al. (2021) yang menegaskan bahwa inakurasi data sasaran dan minimnya integrasi antar program merupakan tantangan struktural program kemiskinan Indonesia, yang dalam konteks Kabupaten Asahan termanifestasi dalam bentuk hambatan teknis *double entry* pada sistem DTSEN-SIKS-

NG. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Sutiyo (2022) yang menemukan bahwa ketidaktepatan distribusi bansos bersumber dari ketidaksesuaian antara kriteria nasional dengan kondisi lokal, persis seperti yang dialami oleh sebagian penerima manfaat di Kabupaten Asahan yang merasa keberatan terhadap penetapan desil DTSEN.

Dari sisi dampak program, temuan Cahyadi et al. (2020) bahwa PKH mampu meningkatkan capaian kesehatan dan pendidikan secara signifikan dalam jangka panjang selaras dengan temuan penelitian ini pada dimensi pencapaian tujuan, di mana penerima manfaat PKH di Kabupaten Asahan melaporkan peningkatan akses layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Namun, serupa dengan kesimpulan Cahyadi et al. (2020), penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan ekonomi transformatif belum sepenuhnya tercapai, mengindikasikan perlunya penguatan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai komplemen bantuan langsung.

Suryahadi et al. (2021) menemukan bahwa program perlindungan sosial yang direspons cepat dan tepat sasaran mampu memitigasi dampak kemiskinan secara signifikan. Hal ini memperkuat pentingnya akselerasi integrasi sistem data yang direkomendasikan dalam penelitian ini agar Dinas Sosial Kabupaten Asahan dapat merespons perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan lebih cepat dan akurat di masa mendatang. Zreik (2025) menambahkan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh ketepatan penargetan berbasis faktor demografis, yang dalam konteks penelitian ini relevan dengan kebutuhan pemutakhiran data DTSEN secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan data kependudukan Disdukcapil.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa program *Graduasi Mandiri* di mana KPM dengan sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan karena kondisi ekonomi yang membaik menjadi indikator keberhasilan program yang paling bermakna. Temuan ini menunjukkan adanya dampak pemberdayaan jangka menengah yang melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek.

Faktor pendukung utama efektivitas program meliputi: kompetensi pendamping PKH yang terlatih melalui Bimtek reguler Kemensos, kolaborasi lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan dan Bank Himbara, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk validasi data penerima manfaat. Faktor penghambat meliputi: keterbatasan jumlah SDM lapangan relatif terhadap luas wilayah, belum otomatisnya integrasi data antar sistem, dan tantangan konektivitas internet di wilayah terpencil.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penanggulangan penduduk miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara telah berjalan cukup efektif berdasarkan empat dimensi teori Richard L. Daft (2016). Dimensi pencapaian tujuan

menunjukkan keberhasilan program dalam menekan angka kemiskinan menjadi 7,18% serta meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat melalui akses kesehatan, pangan, dan pendidikan. Dimensi akuisisi sumber daya menunjukkan pengelolaan multi-sumber yang memadai, meski rasio pendamping terhadap KPM perlu ditingkatkan. Dimensi proses internal menemukan hambatan teknis berupa belum terintegrasinya sistem data secara otomatis. Dimensi kepuasan konstituen strategis menunjukkan respon positif masyarakat, dengan catatan perlunya peningkatan literasi terkait mekanisme klasifikasi desil DTSEN. Suyanto (2018) mengingatkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang dan stigma sosial terhadap kemiskinan, sehingga program-program yang ada tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara material tetapi juga memulihkan martabat dan kapasitas sosial masyarakat penerima manfaat.

Penulis menyarankan: (1) akselerasi integrasi satu data antara DTSEN, SIKS-NG, dan sistem kependudukan Disdukcapil secara otomatis; (2) penambahan jumlah pendamping PKH guna menurunkan rasio pendamping per KPM; (3) penguatan program pemberdayaan ekonomi UEP agar peningkatan kualitas hidup penerima manfaat bertransformasi menjadi kemandirian yang berkelanjutan; dan (4) peningkatan sosialisasi mekanisme DTSEN dan prosedur pembaruan data kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan yang belum merepresentasikan seluruh kecamatan di Kabupaten Asahan, serta keterbatasan akses terhadap data kuantitatif longitudinal yang diperlukan untuk mengukur dampak program secara komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak transisi penuh sistem DTSEN terhadap ketepatan sasaran program bantuan sosial, serta membandingkan efektivitas program di kabupaten dengan karakteristik demografis dan geografis serupa di Provinsi Sumatera Utara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan akses dalam pelaksanaan penelitian, serta kepada seluruh informan yang bersedia berbagi pengalaman dan informasi yang sangat berharga. Terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Rully Sumual, S.Pd., M.AP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abustan. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Rajawali Press.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025.* Jakarta: BPS.

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. American Economic Journal: Economic Policy, 12(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Daft, R. L. (2016). *Organization Theory and Design* (12th ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.

Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal basic incomes versus targeted transfers: Anti-poverty programs in developing countries. *Journal of Economic Perspectives, 32*(4), 201–226. https://doi.org/10.1257/jep.32.4.201

Hutasoit, I. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-602-289-286-1. (194 hal.)

Hastuti. (2025). Efektivitas Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1), 45–60.

Madjid, U., & Supriatna, T. (2025). *Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik.* Jatinangor: IPDN Press.

Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the poverty reduction acceleration policy in Karawang Regency, Indonesia. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 14(2), 1–18. https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/2715

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi.

Matondang, A., et al. (2022). Analisis Efektivitas Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Penerima PKH di Kelurahan Padangmatinggi Lestari. *Jurnal Sosial dan Pembangunan, 8*(2), 112–125.

Nurcahayani, et al. (2024). Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10*(1), 55–70.

Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. Journal of Policy Modeling, 43(6), 1204–1224. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002

Ruja, I. N., Sumarmi, & Idris. (2024). Programs, opportunities, and challenges in poverty reduction: A systematic review. SAGE Open, 14(2). https://doi.org/10.1177/21582440241256242

Santos, M. E., et al. (2015). Multidimensional poverty measurement and analysis. *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).* Oxford University Press.

Suharto, E. (2017). *Kebijakan Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan.* Bandung: Alfabeta.

Suyanto, B. (2018). *Sosiologi Kemiskinan.* Malang: Averroes Press.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of Covid-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(3), 267–296. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519

Sutiyo, S. (2022). On the discourses of social protection distribution: Insights from Indonesia. The Journal of Sociology & Social Welfare, 49(3), 4–24. https://doi.org/10.15453/0191-5096.4607

Sutiyo, S., Sinaga, J. B., & Raharjanto, T. (2020). Does decentralisation in Indonesia give the poor a voice? Evidence from the Purbalingga District. Institutions and Economies, 12(2), 41–66. ISSN 2232-1349 https://jier.um.edu.my/index.php/ijie/article/view/17019

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2017). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson.

UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene.* New York: UNDP.

World Bank. (2019). *Poverty and Shared Prosperity: Piecing Together the Poverty Puzzle.* Washington D.C.: World Bank.

Zreik, M. (2025). The impact of social financial grants on poverty alleviation in rural Indonesia: A demographic and econometric analysis. Asian Social Work and Policy Review. https://doi.org/10.1111/aswp.70011